Available online at:
https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/hadharah/index
Hadharah:
Jurnal Keislaman dan Peradaban
p-issn: 0216-5945 e-issn: 2716-1633
DOI:https://doi.org/10.15548/h.v18i1.9492

EKSISTENSI GERAKAN HTI MASA PEMBAHARUAN DAN PASCA PEMBUBARAN DIKALANGAN MAHASISWA

Yulita
UIN Imam Bonjol Padang, Indonesia
yulita9381@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keberadaan Gerakan Dakwah Hisbut Tahrir pada masa pembaharuan dan setelah pembubaran yang terfokus pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh ormas Hisbut Tahrir dalam mempertahankan identitasnya di kalangan mahasiswa baik mahasiswa kampus islam maupun kampus umum. Kemungkinan ada tiga kegiatan yang dilakukannya, pertama halaqoh kitab dan Nafsiyah. Kedua, pembagian Bulletin Kaffah, pengontakan atau perekrutan anggota baru. Ketiga, media online yang membahas tentang isu-isu hangat yang sedang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif jenis kepustakaan. Data-data dikumpulkan melalui literature yang diperoleh dari perpustakaan dan internet. Hasil dari penelitian mengatakan bahwa keberadaan HTI pasca pembubaran dikalangan mahasiswa masih terus berkelanjut meski HTI di Indonesia telah dibubarkan akan tetapi tidak ditemukan kegiatan HTI pasca pembubaran yang mengarah pada tindakan yang dapat membahayakan keutuhan NKRI.

Kata Kunci; Eksistensi, Pembaharuan dan Pembubaran

This research aims to find out how the existence of Hisbut Tahrir's Da'wah Movement during the renewal period and after the dissolution which focuses on the activities carried out by the Hisbut Tahrir mass organization in maintaining its identity among students both Islamic and general campus students. There may be three activities carried out, first halaqah kitab and Nafsiyah. Second, the distribution of the Kaffah Bulletin, contacting or recruiting new members. Third, online media discusses hot issues that are happening. This research uses a qualitative research method of library type. Data were collected through literature obtained from libraries and the internet. The results of the study say that the existence of HTI after the dissolution among students continues even though HTI in Indonesia has been dissolved but no post-dissolution HTI activities have been found that lead to actions that can endanger the integrity of the Republic of Indonesia.

Keywords; Existence, Renewal and Dissolution

A. PENDAHULUAN

Di dunia Islam, telah lama terjadi gerakan pembaharuan dan pemurnian Islam, baik dari segi wacana secara keseluruhan maupun settingnya. Secara umum, gerakan ini juga dapat dianggap sebagai komponen gerakan sosial yang membayangkan pergeseran hegemoni Barat di seluruh dunia, khususnya di dunia Islam [1].

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) adalah ormas yang digunakan gerakan HTI untuk menyusup ke Indonesia. Pada hakikatnya, gerakan HTI sudah ada sejak awal reformasi, meski pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhiyono baru mengakuinya secara resmi pada tahun 2006. Secara de jure, HTI diakui sebagai organisasi sosial keagamaan oleh Dirjen Kesbangpol Kemendagri, setelah mendapat persetujuan. dengan UUD 1945 dan Pancasila. Sebagai satu-satunya negara yang secara resmi mengakui HT, Indonesia mempunyai posisi unik dalam HTI 2.

Salah satu gerakan politik Islam di Indonesia yang fokus pada pendirian kekhalifahan Islam disebut HTI. HTI secara terus-menerus membela prinsip-prinsip khilafah Islam melalui filosofi yang diperjuangkannya, tindakan yang dilakukan, dan aktor—anggota dan kader—yang terlibat. Organisasi HTI meyakini bentuk pemerintahan tertinggi adalah Khilafah Islam. Hisbut Tahrir tidak hanya memiliki reputasi memperjuangkan kekuasaan Islam di suatu negara, tetapi ia juga ingin menyatukan semua negara Islam di bawah kekhalifahan.

Pembubaran Hizbut Tahrir (HTI), sebuah gerakan politik, merupakan perkembangan yang relatif baru di Indonesia. Awalnya, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menggunakan segala taktiknya untuk memperjuangkan penyebaran khilafah secara sembunyi-sembunyi. Mereka tidak berani menampakkan diri hingga era reformasi. Namun pada 19 Juli 2017, Berdasarkan keputusan resmi, tindakan internasional ini dianggap melanggar hukum. Seperti yang dinyatakan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017, keputusan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Hal ini lebih banyak diakui di kalangan generasi muda, terutama di kalangan pendidikan tinggi, sebagai ekspresi gagasan khilafah yang dihasilkan oleh struktur HTI dan anggota HTI. Generasi muda yang menuntut perubahan drastis kemungkinan besar akan mendukung visi kekhalifahan. Kelompok sayap kanan HTI juga dikenal sebagai Gema Pembebasan di kampus, di mana kedua kelompok tersebut mengadvokasi tujuan yang sama dan terlibat dalam kegiatan serupa. Salah satu pendekatan mobilisasi sumber daya manusia yang mungkin dilakukan untuk pengembangan gerakan HTI adalah generasi muda di kampus. Mereka menggunakan sistem sel yang disebut fikrah untuk melakukan jaringan, dan mereka selanjutnya dibantu oleh sumber-sumber digital yang kuat, media cetak dan web, serta sumber daya lainnya. Situs web seperti

[1] M Azzam Manan, "Pemikiran Pembaruan Dalam Islam: Pertarungan Antara Mazhab Konservatif Dan Aliran Reformis," *Masyarakat Indonesia*, no. 2 (2021): 187–207, http://ejournal.lipi.go.id/index.php/jmi/article/view/653.

[2] Jurnal Multikultural, "1 Issn 1412-663x" VIII, no. 31 (n.d.).

http://www.hizbuttahrir.or.id/, majalah Al-Wa'ie, dan film yang menggambarkan Kekhalifahan Islam. Orang-orang muda lebih sering mengakses situs web ini. Selain itu, mereka menyebarkan media tersebut melalui sekolah, masjid, dan lokasi lainnya.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan informasi dari sumber primer dan sekunder mengenai tindakan yang diambil pasca pembubaran HTI. Informasi dikumpulkan melalui buku, jurnal, dan artikel berita di media. Penulis mencoba membandingkan kegiatan sebelum dan sesudah pembubaran HTI agar dapat mengetahui lebih jauh mengenai eksistensi gerakan pembaharuan di Indonesia, para pendirinya, dakwah Syekh Tqiyyudin An-Nabani, serta kegiatan yang dilakukan oleh organisasi orientasi politik HTI pasca pemerintahan. membubarkannya. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam pengolahan datanya, maka hasil pencarian yang berbeda dari sumber primer dan sekunder yang relevan dengan topik penelitian dianalisis, dibandingkan, dan diinterpretasikan secara kritis.

C. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Gerakan Pembaharuan

Barat mengartikan "modernisasi" sebagai "pembaharuan" (pemurnian), atau al-tajdid dalam bahasa Arab yang artinya "pemikiran tentang gerakan penyesuaian pemahaman agama Islam terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern." Para pemimpin Islam modern berharap dapat memisahkan umat Islam dari gagasan kemajuan melalui penggunaan imajinasi ini. Dalam bahasa Arab, "tajdid," atau "pembaruan," mengacu pada menjaga integritas asli teks sambil menghidupkan kembali simbol-simbol Islam dan membangun kembali landasannya sebagai iman yang sempurna dan mulia. Menghapuskan bid'ah dan penyimpangan-penyimpangan lain yang dianggap mencemari Islam dalam bidang sulukiyah (berperilaku akhlak), amaliyah (ibadah), dan nazhariyah (berpikir) [3].

Selain frasa tajdid yang mengacu pada pembaruan agama Islam, istilah ishlah juga digunakan untuk menandakan perubahan (dalam konteks perbaikan), yang lebih jelas pada tingkat operasional lapangan yang berupa upaya pelestarian. atau memurnikan Islam. Oleh karena itu, tiga elemen reformasi Islam berikut ini dapat diverifikasi berdasarkan penafsiran ini. Pertama, kata "reformasi" dalam Islam menggambarkan inisiatif untuk melakukan perubahan. Setelah umat Islam menyadari dan mempertimbangkan situasi internal yang mereka alami, mereka melakukan upaya tersebut. Kedua, reformasi Islam berfokus pada doktrin agama Islam, terutama hasil dari penelitian dan ide ulama sebelumnya. Dengan kata lain, pembaharuan Islam tidak bermaksud untuk memperbarui atau mengubah Al-Qur'an dan Sunnah karena

[3] Sebuah buku yang ditulis oleh Iain Sultan dan Amai Gotontalo berjudul "Sejarah Pembaruan Islam Di Indonesia Rifki Abror Ananda A. Pendahuluan Secara Teologis Islam Merupakan Sistem Nilai dan Ajaran Yang Bersifat Ilahiah (Transenden)." Dalam konteks ini, Islam dianggap sebagai Pandangan Dunia (Weltanschaung), yang memberikan "Kaca" 2, no. 1 (2019): 19–40.

kebenaran adalah mutlak dan shalih likulli masa wa makan. Ketiga, meskipun reformasi Islam sering kali terlalu penting untuk diabaikan dalam diskusi politik yang lebih besar, reformasi Islam merupakan fokus para reformis di dalam komunitas Muslim dibandingkan dengan pihak luar yang bukan Muslim. Keempat, walaupun reformasi internal dalam Islam tidak diragukan lagi tercipta dari kesadaran dan kelonggaran terhadap kendala-kendala internal dalam pandangan dunia Islam, sejarahnya tidak dapat dilepaskan dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kontemporer[4].

Landasan reformasi Islam biasanya bersifat normatif dan teologis. Yang dimaksud dengan landasan normatif reformasi Islam dalam konteks ini adalah wahyu, yang berupa hadis dan ayat-ayat Al-Qur'an yang menyampaikan makna membalikkan keadaan. Al-Qur'an ayat 4 "wala al-akhiratu khairullaka minal ula" sering dikutip oleh banyak ulama sebagai landasan normatif reformasi Islam. Faktanya, yang terakhir ini lebih bermanfaat bagi Anda daripada yang pertama[5]. Di sisi lain, Hamid dan Yaya menambahkan landasan normatif reformasi Islam dengan menggunakan Qs. ar-Ra'du: 11 "innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim..." dalam Qs. Ad-Dhuha (44) ayat 4. Sesungguhnya Allah tidak dapat mengubah nasib seseorang selain dirinya sendiri. melakukannya. Dalam kerangka reformasi Islam, kedua ayat ini menggarisbawahi perlunya umat Islam mengambil inisiatif untuk mengubah pemikiran dan perilaku mereka guna meningkatkan status mereka dari inferioritas menjadi superioritas. Lebih lanjut menurut Hamid dan Yaya, kebangkitan Islam dilandasi oleh prinsip-prinsip normatif yang tertuang dalam hadis Nabi Muhammad SAW berikut ini: “Pada setiap awal abad, Allah akan mengutus kepada umat ini seseorang yang akan memperbaharui (memahami) keislaman mereka. agama."[6].

Kerangka teologis untuk peremajaan Islam dibangun oleh dua jenis keyakinan: tujuan agama Islam yang rahmatan li al-'alamin (rahmat bagi seluruh alam semesta) dan universalisme Islam. Salah satu makna utama universalisme Islam adalah bahwa Al-Qur'an mencakup semua aspek kehidupan manusia. Artinya, agama Islam harus dapat diterapkan kepada siapa pun yang tidak terbatas dalam waktu dan ruang yang tidak terbatas. Karena sebagian besar ayat-ayat Al-Qur'an tidak memberikan penjelasan yang jelas dan komprehensif mengenai suatu permasalahan, maka penting bagi para cendekiawan dan reformis Islam untuk memberikan penafsiran dan

[4] Suaidi Asyari, “Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam Di Indonesia,” *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 35, no. 2 (2011): 295–313, https://doi.org/10.30821/miqot.v35i2.145.

[5] M. Ridwan Lubis, “Pembaharuan Pemikiran Islam : Dasar,Tujuan, Dan Masa Depan,” *Ilmu Ushuluddin* 5, no. 2 (2016): 223–46.

[6] Al-tadabbur Kajian Sosial, “Pengertian Modern, Latar Belakang Muncul Dan Berkembangnya Pembaharuan Dalam Islam,” *Al-Tadabbur: Kajian Sosial, Peradaban, Dan Agama* 8, no. 1 (2022): 93–111, http://dx.doi.org/10.46339/altadabbur.

penjabarannya terhadap ayat-ayat tersebut, dengan selalu mengingat kaitannya dengan dinamika masyarakat kontemporer. -selalu berevolusi [7].

Sejarah Gerakan HTI Di Indonesia

Pada masa Orde baru Hizbut Tahrir mulai berkembang di Indonesia pada tahun 1980. Namun sejak tahun 1972, konsep Hizbut Tahrir secara bertahap mulai mendapat perhatian di Indonesia. Ketika aktivis Hizbut Tahrir kelahiran Australia, Abdurrahman al-Baghdadi, pindah ke Bogor pada tahun 1982–1983 – gerakan ini menjadi semakin intens. Semuanya bermula ketika Abdullah bin Nuh, seorang ulama, penulis, dan pejuang Indonesia, diperkenalkan kepada Abdurrahman al-Baghdady setelah ia menyampaikan pidato tentang perlunya melestarikan kekhalifahan di Australia. Setelah pertemuan mereka, Abdullah bin Nuh memberikan undangan kepada Abdurrahman al-Baghdadiy untuk pindah ke Bogor, Indonesia. Abdurrahman Al-Baghdadiy memulai dakwahnya dan membawa Hizbut Tahrir ke banyak lokasi, termasuk pesantren dan kampus-kampus. Dalam masa pengajarannya, khotbah-khotbah yang ditujukan dan memperjelas Hizbut Tahrir [8].

Selanjutnya, Hizbut Tahrir berkembang di seluruh Indonesia melalui perguruan tinggi seperti Universitas Padjadjaran, IKIP Malang, Unhas, dan Unair, antara lain. Anggota Hizbut Tahrir sebagian besar adalah siswa, termasuk guru, siswa lain, dan siswa pada umumnya. Hizbut Tahrir memiliki cabang di seluruh Indonesia; terutama pada tahun 1990-an, pengaruh mereka meningkat dan meresap ke seluruh masyarakat. Ini karena anggota Hizbut Tahrir mulai berdakwah di banyak tempat, seperti pabrik, masjid, perkantoran, dan rumah. Selain itu, mereka menyebarkan ideologi dan perspektifnya melalui selebaran yang ditemukan di media cetak dan online. Hizbut Tahrir menggunakan media cetak, termasuk buku, majalah, dan buletin, untuk meningkatkan transmisi pandangan mereka dan berfungsi sebagai tempat diskusi mengenai topik politik terkini[9].

Hizbut Tahrir menggunakan kader dan teknik pelatihan terselubung untuk menjalankan ajarannya di seluruh rezim Orde Baru. Keterbukaan publik terhadap Sebagian besar anggota dan struktur organisasi tidak terjadi. Karena agenda politik yang antagonis terhadap Hizbut Tahrir, mereka harus berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama Orde Baru. Hizbut Tahrir berpartisipasi dalam dakwah Islam dan aktivitas politik di Indonesia. Tujuan gerakan politik Hizbut Tahrir Indonesia adalah untuk menyebarkan kesadaran akan aturan Allah dan menganjurkan pembentukan negara Islam. Konferensi sedunia tentang Kekhalifahan Islam diselenggarakan oleh Hizbut Tahrir di Jakarta pada tahun 2002. pejabat dari kelompok Islam, organisasi lain,

[7] Asep Saefullah, "MEMBANGUN PERADABAN DUNIA YANG DAMAI: PENTINGNYA PEMBAHARUAN ISLAM DAN 'KEARIFAN' BARAT (Tinjauan Buku 'Masa Depan Islam' Karya John L. Esposito)," *Harmoni* 11, no. 1 (2012): 147–54, https://doi.org/10.32488/harmoni.v11i1.238.

[8] Siti Muazaroh, "Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia Perspektif Maqashid: Otoritas Atau Otoritarianisme," *Justicia Islamica* 16, no. 1 (2019): 103–20, https://doi.org/10.21154/justicia.v16i1.1622.

[9] Syaiful Arif, "Pandangan Dan Perjuangan Ideologis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Dalam Sistem Kenegaraan Di Indonesia," *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 7, no. 1 (2016): 93–104, https://doi.org/10.46807/aspirasi.v7i1.1282.

Hizbut Tahrir Internasional, dan pejabat nasional hadir pada kesempatan tersebut. Ada sekitar 5.000 peserta dalam pertemuan tersebut[10].

Kehadiran konferensi tersebut memberikan lampu hijau kepada Hizbut Tahrir di Indonesia untuk mulai dengan formal menggerakan dakwah serta operasi lainnya di depan umum. Karena mampu menjalankan operasinya dan memprotes invasi Amerika ke Afghanistan, acara tersebut dianggap sukses. Selain itu, Hizbut Tahrir menyelenggarakan pawai panjang dengan sekitar 12.000 peserta pada Sidang MPR tahun 2002 dengan tujuan menerapkan hukum Islam. menggunakan pengejaran yang sama. Sekitar 20.000 kader mengikuti pawai panjang dari Monas hingga Bundaran HI untuk memaksakan pembentukan ISIS dan penerapan aturan Islam[11].

Hizbut Tahrir Dalam Bentuk Gerakan Sosial-Politik

Hizbut Tahrir Dalam Gerakan Sosial

Para ahli mendefinisikan Hizbut Tahrir sebagai gerakan kerakyatan Islam yang mengikuti Khilafah. Mereka lebih fokus pada strategi gerakan sosial dalam dakwah mereka. Eyerman dan Jamison mendefinisikan gerakan sosial sebagai upaya kelompok yang berkolaborasi untuk mencapai transformasi sosial. Dengan kata lain, mereka adalah kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama: secara kolektif mengungkapkan ketidakpuasan mereka dan mengubah landasan sosial dan politik yang dianggap tidak memadai. Hizbut Tahrir dipandang dari perspektif gerakan sosial.Awalnya, gerakan tersendiri bertujuan untuk membawa perubahan. Sztompka menegaskan bahwa ada dua jenis gerakan pertama dalam hal ini; yang pertama berfokus pada modifikasi kerangka sosial, sedangkan yang kedua berkonsentrasi pada modifikasi pada pribadinya [12].

Hizbut Tahrir lebih merupakan gerakan individualis bila dilihat melalui kacamata gerakan sosial. Landasannya adalah anggapan mereka bahwa peningkatan kualitas individu akan membawa perbaikan positif pada tatanan sosial. Gerakan sosial berbeda yang memiliki "arah perubahan yang diinginkan" adalah yang kedua. Hal ini menunjukkan bahwa pergerakan ini awalnya bersifat positif namun berubah menjadi negatif ketika didorong untuk bereaksi terhadap pergerakan positif tersebut. Perubahan yang tidak diinginkan ini merupakan efek samping yang tidak terduga. Beberapa contohnya adalah upaya untuk melestarikan budaya asli, menghidupkan kembali karakteristik nasional atau etnis, atau mempertahankan keyakinan agama[13].

Hizbut Tahrir Dalam Gerakan Politik

Hizbut Tahrir telah beroperasi sebagai partai politik sejak didirikan. Sebab Hizbut Tahrir Indonesia mengatur masyarakat dan negara, mereka dapat dikategorikan

[10] Asyari, "Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam Di Indonesia."

[11] Sudarno Shobron, "Model Dakwah Hizbut Tahrir," *Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta* 15, no. 1 (2014): 44–62, https://scholar.google.com/scholar?start=30&q=teologi+hizbut+tahrir&hl=id&as_sdt=0,5#:~:text=Shobron%2C S. (2014). Model Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia.

[12] M Firdaus, "Pola Komunikasi Aktivis Hizbut Tahrir Dalam Mengembangkan Dakwah Islam," *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2018, https://jkms.ejournal.unri.ac.id/index.php/JKMS/article/view/5670.

[13] Azman Azman, "5329-Article Text-12634-1-10-20180716" 7, no. 1 (2018): 99–113.

sebagai gerakan politik. Dalam konteks ini, tujuan utama Hizbut Tahrir adalah mempertahankan Khilafah Islam sebagai sebuahstruktur politik. Hizbut Tahrir berjuang melalui politik budaya, terutama pengembangan kaderisasi dan pendidikan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, dalam upaya mencapai tujuan mulia tersebut [14].

Pemilu bukanlah satu-satunya cara bagi Hizbut Tahrir Indonesia untuk melaksanakan tujuan politiknya, yaitu membangun negara khilafah. Bisa dibayangkan, hal inilah yang menjadi alasan Hizbut Tahrir Indonesia memilih tidak ikut pemilu. Keputusan Hizbut Tahrir untuk abstain dalam pemilu di Indonesia menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan sebuah gerakan sosial-politik. Kesimpulan ini didukung oleh persamaan antara gerakan Hizbut Tahrir dengan gerakan sosial, yang juga sejalan dengan gerakan politik. Gerakan-gerakan politik ini dicirikan oleh kelompok-kelompok yang sangat terorganisir dengan tujuan, strategi, dan ideologi yang pasti.

Dinamika Hizbut Tahrir di Indonesia

Dalam hampir 50 tahun sejak mulai berdakwah, Hizbut Tahrir sering kali menghadapi kesulitan, kemunduran, dan pencemaran nama baik. Komunitas Islam sendiri dan juga negara-negara Barat menghadirkan kesulitan-kesulitan ini. Karena mereka berjuang demi pemulihan kekhalifahan Islam dan kebangkitan umat Islam, Hizbut Tahrir menghadapi tantangan dari barat. Mereka menganggap Hizbut Tahrir membahayakan keberlangsungan eksistensi mereka karena hal tersebut [15].

Hizbut Tahrir tiba di Indonesia di bawah pemerintahan Orde Baru. dimana kebebasan politik tidak sebesar pada periode Reformasi. Bahkan masyarakat saat itu tidak mampu mengutarakan ide serta ambisinya, pendekatan diktator Orde Baru Soeharto juga menghambat gerak dan dakwah Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir menghadapi hambatan pembangunan tidak hanya dari pemerintah tetapi juga dari kehadiran partai dan organisasi politik di Indonesia (Fitrina Hasanah, 2016). Hizbut Tahrir berkembang ke seluruh Indonesia pada era reformasi. Namun, meskipun mereka berkhotbah dan berjuang untuk mendapatkan dan mengembangkan keanggotaan mereka, hambatan dan tuduhan samar-samar dari berbagai partai tidak berkurang[16].

Hizbut Tahrir mulai berdakwah di Makassar pada tahun 1994. Semua bermula dari seorang mahasiswa Universitas Muslim Indonesia yang tertarik dengan filosofi Hizbut Tahrir yang pernah ia baca di Majalah Al-Wa'ie. Ia memutuskan untuk mengikuti halaqah di Malang. Pertemuan seluruh LDK se-Indonesia diadakan di

[14] A. Rouf, "Hizbut Tahrir: Pemikiran Dan Pergerakan Sosial-Politik Di," *Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula* 7 (2022): 175–89.

[15] Ahmad Khoirul Mustamir Ahmad Subakir, "Institut Agama Islam Negeri Kediri, Indonesia Institut Agama Islam Tribakti Kediri, Indonesia 1," *Www.Ejournal.Iai-Tribakti.Ac.Id/Index.Php/Tribakti Permanent* 31 (2020): 187–201.

[16] Zulfadli Zulfadli, "Orientasi Politik Aktivis Eks Hizbut Tahrir Indonesia Pasca Dibubarkan," *Kontekstualita* 33, no. 02 (2018): 169–89, https://doi.org/10.30631/kontekstualita.v35i02.133.

Malang, Jawa Timur, pada tahun 1998–1999. Aktivis LDK Medan dan Hizbut Tahrir Indonesia bertemu di konferensi tersebut.[17].

Pada 19 Juli 2017, pemerintah Indonesia resmi membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia dengan mencabut izin badan hukum ormas tersebut. Keputusan ini dibuat sebagai tanggapan atas Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30.AH.01.08 Tahun 2017, yang mencabut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU0028.60.10.2014, yang telah mengesahkan badan hukum organisasi secara keseluruhan. Perppu 2 Tahun 2017, yang mengubah UU 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, tersedia di sini.

Pengaruh Gerakan Hizbut Tahrir Di Indonesia

Ada yang berpendapat bahwa organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) didirikan adalah contoh aksi sosial kolektif. Mengenai penegasan tersebut, teori Max Weber cukup tepat. Weber berpendapat bahwa keputusan dan keprihatinan yang diungkapkan secara sadar melalui aktivitas sosial terkait erat dengan tindakan itu sendiri. Weber melanjutkan, aktivitas sosial adalah tindakan individu asalkan terfokus pada aktivitas orang lain dan mempunyai arti atau kepentingan pribadi bagi individu tersebut (Max Weber, 1964).

Memang pemerintah Indonesia sudah membubarkan Hizbut Tahrir saat ini. Namun pecahnya organisasi Hizbut Tahrir bukan berarti ajaran dan pengaruhnya hilang dari Indonesia. Pengaruh-pengaruh tersebut antara lain:

1. **Pengaruh Positif**
   a. Dakwah Individu Muslim Tujuan dari metodologi pengembangan kader Hizbut Tahrir Indonesia adalah menciptakan partai melalui pengarahan yang tegas melalui halaqah dan buku penjelasan isi dakwah. Di sini, HTI tidak pernah melakukan cuci otak; sebaliknya, khotbah-khotbahnya disampaikan secara jujur dan kritis. Setiap kelompok Islam dipandang sebagai sumber kader HTI yang potensial. Dengan demikian, buletin alIslam dapat diakses oleh siapa saja, dan dimaksudkan agar setiap orang membacanya sebelum menjadi kader HTI.
   b. Kecaman kelompok. Hal ini dicapai melalui mengadakan acara-acara publik seperti seminar dan ceramah.
   c. Mendidik masyarakat tentang Islam dengan mengirimkan buletin secara mingguan atau bulanan dalam upaya menghadapi perubahan masyarakat.
   d. Terungkapnya skema pengkhianatan dibuat oleh penentang Islam, telah diyakini HTI sebagai penjajah kafir.

Organisasi sedunia ini sangat menekankan fungsi negara (dawlah) atau kekhalifahan dalam menegakkan hukum Islam. Kelompok ini terdiri dari orang-orang yang mempertahankan gagasan integrasi agama dan negara karena meyakini syariah harus ditegakkan oleh otoritas negara. Meskipun umat Islam di Indonesia merupakan mayoritas, sebagian dari mereka merasa sulit menerima gagasan penegakan hukum

[17] Zulfadli.

Islam. Namun kurangnya pemahaman mereka mengenai esensi hukum Islam adalah ciri paling umum dari mentalitas penolakan ini[18].

Oleh karena itu, seluruh aktivis HTI wajib memberikan edukasi kepada umat Islam akan pentingnya syariat Islam. Selanjutnya, HTI mempertimbangkan situasi sosiologis ini ketika merencanakan agendanya, yang mencakup penginjilan ke berbagai kelompok melalui khotbah dan seminar, diskusi, dan wawancara dengan tokoh-tokoh terkemuka, menjalin kontak dengan ulama, dan menggantung spanduk serta membagikan brosur[19].

2. Pengaruh Negatif

Walau Hizbut Tahrir tidak terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk maju dalam pemilu Indonesia, kerap menegaskan bahwa dirinya adalah partai politik. HTI mendefinisikan partai politik secara luas sebagai suatu entitas yang tindakannya bertujuan untuk mengekang kepemimpinan dan menciptakannya dengan alasan (haq). HTI adalah organisasi politik dengan tiga karakteristik utama. Pertama-tama, ideologinya berakar pada Islam yang dijadikan kerangka penilaian berbagai aspek kehidupan. Kedua, karena HTI merupakan salah satu komponen Hizbut Tahrir Internasional yang mempunyai perwakilan di seluruh dunia, maka domainnya bersifat global. Ketiga, karena sifat operasionalnya yang ekstra-parlementer, HTI tidak mendaftar sebagai peserta pemilu. Namun operasional HTI juga berbeda dengan organisasi besar lainnya, yang juga bergerak dalam bidang sosial dan pendidikan20.

HTI sebagai partai politik harus mendukung berdirinya Khilafah Islamiyah; agar mencapai hal tersebut, HTI harus memperkuat Ukhuwah Islamiyah yang bekerjasama dengan umat Islam lainnya agar memperoleh kekuatan. Pemberlakuan pemerintahan Islam mungkin akan segera selesai, meski pembentukan kekhalifahan akan memakan waktu. Islam adalah rahmatan lil alamin, yang membawa rahmat kepada semua makhluk. golongan, sehingga formalisasi syariat ini tidak akan mempunyai peluang untuk berantakan. Ada dua faktor yang menjadikan perlunya berdirinya khilafah: pertama, Khilafah Islam adalah suatu bentuk pemerintahan yang didirikan oleh para sahabat dan dicontoh oleh Nabi Muhammad SAW. Kedua, diperlukan pemimpin yang mampu mempertemukan berbagai kalangan Islam. Hal ini menyiratkan bahwa penguasa kekhalifahan tidak bisa dilokalisasi; Sebaliknya, mereka harus bersifat universal.

---

[18] Liran Ma et al., "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析Title," *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part J: Journal of Engineering Tribology* 224, no. 11 (2019): 122–30.

[19] Mochamad Faizal Rizki, "Deradikalisasi Pengikut Hizbut Tahrir Indonesia Pasca Terbitnya Perppu No.2 Tahun 2017 Tentang Ormas," *Jurnal Politikom Indonesiana* 3, no. 1 (2018): 164.

[20] Risyad Arhamullah Nadialista Kurniawan, "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析Title," *Industry and Higher Education* 3, no. 1 (2021): 1689–99, http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/1288.

Fokus organisasi ini kini adalah membangun kekhalifahan. HTI mengklaim gagasan khilafah merupakan doktrin Islam yang diabaikan yang menjadi penyebab jatuhnya umat Islam. Al-Qur'an, Sunnah Nabi, dan kesepakatan para sahabat menjadi landasan kewajiban melestarikan khilafah. Meskipun tidak ada arahan untuk mendirikan negara Islam dalam kitab suci, kekhalifahan perlu ditafsirkan dalam konteks sejarahnya. Untuk mencapai hal tersebut, HTI fokus pada pengembangan masyarakat dan penyiapan kader dibandingkan terjun ke dunia politik melalui lembaga legislatif[21].

Selain itu, HTI secara aktif berkontribusi pada pembentukan pandangan masyarakat tentang berbagai perspektif Islam tentang masalah tersebut. sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Tujuan akhir dari pendekatan politik ini adalah untuk mengembalikan kehidupan Islam sehingga dapat diterapkan pada masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, tujuan utama kampanye politik mereka adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kehidupan Islam dibandingkan memenangkan pemilu, yang mereka yakini hanya bersifat sementara. Menurut mereka, jika banyak partai Islam yang bersaing, pemilu bisa menimbulkan kerugian bagi masyarakat karena pemilih bisa membagi surat suaranya[22].

Eksistensi Gerakan HTI Pasca Pembubaran Di Kalangan Mahasiswa

Persoalan nyata yang dihadapi pemerintah Indonesia ketika HTI memilih bubar adalah memastikan, selain "mengubur" organisasi HTI, gagasan khilafah juga "dikubur". Tentu saja ini adalah tugas yang sangat menantang. Melihat pengalaman beberapa negara sebelum HT, kami menemukan bahwa meskipun ada larangan dari pemerintah, para anggota dan pendukung HTI tetap bertahan dan mempertahankan visi mereka di sejumlah negara tersebut. Misalnya, meskipun pemerintah telah menyatakan perang mereka melanggar hukum, nampaknya mantan anggota HT masih berperang secara diam-diam di negara-negara Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Mesir, Turki, Bangladesh, dan Pakistan [23].

Setelah organisasinya dibubarkan, HTI dapat memutuskan untuk mengambil jalan lain dan menjadi anggota partai politik. Mereka akan mencari kelompok politik seperti PKS, PPP, PAN, dan PBB yang ideologinya identik atau sebanding dengan eks HTI. Jika mereka tidak membela dan mempertahankan ide-idenya sebagai sebuah organisasi, situasi ini akan muncul. Hal ini juga mungkin ni terjadi karena partai politik biasanya pragmatis dan tidak peduli dengan identitas kelompok atau agama.Partai politik akan dengan mudah menerima suatu kelompok, apapun sejarah kelompok

[21] Ahmad Subakir, "Institut Agama Islam Negeri Kediri, Indonesia Institut Agama Islam Tribakti Kediri, Indonesia 1."

[22] Muazaroh, "Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia Perspektif Maqashid: Otoritas Atau Otoritarianisme."

[23] Paelani Setia, "Kekhilafahan_Islam_Globalisasi_dan_Gerilya_Maya_St.Pdf" 9 (2021): 241–64, https://doi.org/10.21043/fikrah.v8i1.

tersebut, selama kelompok tersebut dapat mendatangkan suara. Mereka bahkan dapat memberikan pemimpin HTI posisi penting dalam hierarki partai[24].

Wajar jika Taqiyuddin an-Nabhani, pendiri organisasi tersebut, menggunakan karyanya al-Takattul al-Hizbiy untuk merumuskan filosofi ideologisnya, yang mendorong prediksi di atas mengenai aksi-aksi HTI pasca pembubaran. Melalui buku ini, HTI tidak hanya tidak akan mundur dari perlawanannya terhadap demokrasi, namun juga akan terus menantang legitimasi pemerintahan yang dianggap sekuler, mempromosikan khilafah dan meminta orang Islam untuk meninggalkan nasionalisme atau agama mereka sebagai penggantinya.

Gagasan bahwa pemulihan kekhalifahan adalah janji Allah yang tidak dapat diingkari adalah prinsip lain HTI yang mendorong perjuangan organisasi tersebut. Hal inilah yang menyebabkan pihak pendukung HTI terus menerus berdebat dan berdakwah. Keyakinan teologis bahwa umat Islam yang binasa "mati dalam keadaan jahiliah" karena tidak mengikrarkan kesetiaan kepada imam atau khalifah, serta alasan taktis gerakan tersebut, inilah yang menyebabkan pelarangan gerakan HTI. Jika khilafah tidak terbentuk dalam masa hidup mereka, penganut HTI percaya Sangat penting untuk mempertahankan khilafah dan menentang pemerintahan dan sistem sekuler, dengan janji surga sebagai imbalan akhirat. Dengan mempertimbangkan berbagai filosofi di atas, jelas bahwa gerakan HTI di Indonesia tidak akan hilang. Sistem Organisasi tersebut boleh saja bubar, namun konsep berperang atas nama kekhalifahan Islam akan tetap ada, bahkan dengan "pakaian" dan model gerakan baru[25].

Kegiatan-kegiatan HTI pasca pembubaran

Halaqah dan Nafsiyah Sebagai Proses Indoktrinasi

HTI mempunyai cara khusus dalam membangun kaderisasi, yaitu dengan menggunakan kalimat "Halaqah". Kelompok belajar yang berbentuk lingkaran disebut halaqah. Sebagai sarana pengembangan kader dan indoktrinasi, pendekatan ini dianggap unik dan signifikan. "Satuan kecil anggota partai dan kader-kader baru yang dibentuk sebagai wadah atau wadah untuk mengkaji ideologi partai secara intensif di bawah bimbingan seorang anggota senior yang berpengalaman." demikianlah Taji-Farouki mencirikan halaqah. Setiap sesi halaqah memiliki lima peserta baru yang duduk di sekitar seorang instruktur. Setiap halaqah biasanya berlangsung selama dua jam. untuk diselesaikan. Status keanggotaan seseorang dalam Halaqah ditentukan oleh kehadiran anggota barunya[26].

Pertemuan yang berfungsi sebagai ujian ini dikenal dengan istilah mutataba'at usbu'iyyah. Sejumlah aktivis perempuan mengklaim Min Muqawwimat an-Nafsiyah

[24] ANIEK FATLAHAH, "Metadata, Citation and Similar Papers at Core.Ac.Uk 4," *Донну* 5, no. December (2015): 118–38.

[25] Abd Qohar and Kiki Muhamad Hakiki, "Eksistensi Gerakan Idiologi Transnasional HTI Sebelum Dan Pasca Pembubaran," *Kalam* 11, no. 2 (2017): 365–96, https://doi.org/10.24042/klm.v11i2.1403.

[26] Uus Uswatusolihah and Sangidun Sangidun, "Interaksi Sosial Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (Mhti) Pasca Pembubaran," *YINYANG: Jurnal Studi Islam, Gender Dan Anak* 13, no. 2 (2018): 349–69, https://doi.org/10.24090/yinyang.v13i2.2018.pp349-369.

alIslamiyah (Pilar Kepribadian Islam) terbitan HTI merupakan buku pertama yang patut mereka baca dan pahami. Berdasarkan apa yang saya baca, buku ini banyak memuat hadits dan ayat dengan tema berbeda-beda yang memberikan nasehat bagaimana mengembangkan kepribadian seorang muslim. Patut dicatat bahwa para aktivis perempuan umumnya menggunakan kode atau singkatan untuk menyebut karya referensinya, contohnya adalah MU DF (dirasah fardiyyah), MM (min muqawwimat)waspol (wawasan politik), dan (mutataba'atusbu'iyyah). Mengingat kedudukan seorang hizbiyyin mayoritas adalah mahasiswa, maka pengukuran waktu menjadi salah satu aspek tersibuk dari seluruh kegiatan pembelajaran yang dilakukan HTI[27].

Dakwah melalui berbagai media

Mengingat dakwah diwajibkan oleh undang-undang, para penggiat dakwah harus mempertimbangkan dengan cermat cara terbaik menggunakan media yang sudah ada agar tetap mendapatkan informasi terkini tentang peristiwa terkini. Internet kini menjadi media yang berkembang. Sebagai reaksinya, para aktivis telah menemukan platform untuk berdakwah di media sosial karena pertumbuhan internet yang sangat pesat. Untuk memanfaatkan penggunaan internet yang luas dan disiplin, EKS HTI mengembangkan sejumlah platform media sosial. EKS HTI adalah pemilik Facebook dan Instagram. Instagram untuk EKS HTI dibagi menjadi banyak profil. Anak laki-laki EKS HTI membawahi akun bernama GP (Gerakan Pembebasan), sedangkan anak perempuannya membawahi BMI (BackMuslim Identity). EKS HTI adalah salah satu media yang sering digunakan untuk dakwah yaitu publikasi online. Akun muslim_news_id merupakan majalah online. Peneliti memperoleh akses ke akun media sosial EKS HTI dengan nama baru dengan berbicara kepada musyrifah organisasi tersebut [28].

Subbab Hasil Kajian memuat temuan-temuan dakwah eks HTI pasca pembubarannya. Dua jenis media yang digunakan dalam Dakwah Eks HTI: media cetak dan media baru. Berikut akan dijelaskan cara penggunaan kedua media tersebut.

Dakwah Dengan media cetak

Pendidikan HTI dalam kurun waktu yang sangat lama dilakukan melalui media cetak. jauh sebelum pecahnya Eks HTI. Siaran media cetak yang dulunya berasal dari HTI tersebar di seluruh Indonesia menunjukkan hal tersebut. Mulai dari majalah atau buletin yang diberi nama HTI hingga buletin yang tidak bermerek HTI demi menjaga kerahasiaannya.

[27] Sepri Yunarman, Nurul Fhadilah, and Ali Akbarjono, "GERAKAN SOSIAL EKS HIZBUT TAHRIR INDONESIA PASCA PEMBUBARAN (Studi Kasus Di Bengkulu)," *Jurnal Sosiologi Nusantara* 8, no. 1 (2021): 59–84.

[28] Nadialista Kurniawan, "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析Title."





Sumber: *http://www.halqoh.com/?p=424*

Sumber: *http://hizbut-tahrir.or.id/*

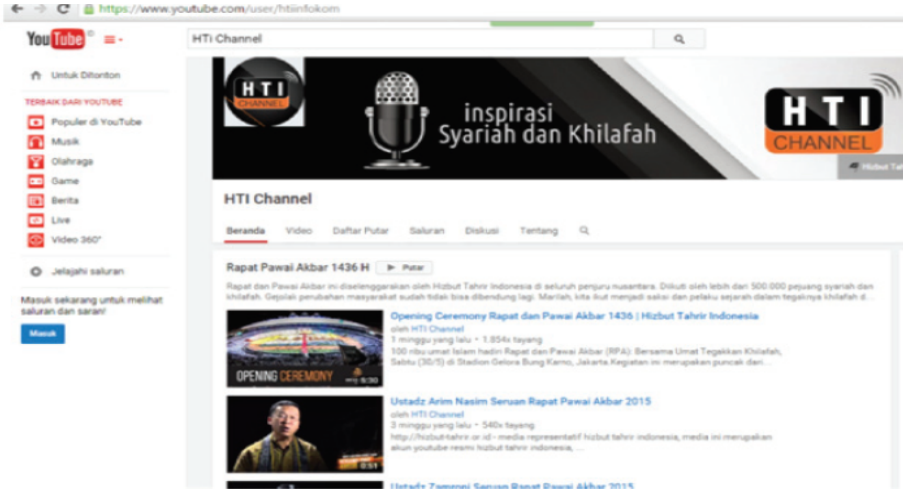


Faktanya, informasi di ketiga media cetak sama. Terkait khilafah, ketiganya membahas hal yang sama. Namun sampul buletinnya tampak berbeda. Dalam buletin awal tidak dijelaskan bahwa eks HTI yang mengawasinya. Masalahnya, eks-HTI selalu mengutarakan poin penting yang sama, dan langsung terpampang di sampul buletin. Karena eks-HTI merupakan kelompok massa terlarang yang tetap berkiprah dalam dakwah di Indonesia, permasalahan kritis ini menunjukkan bahwa buletin tersebut dikelola oleh mereka.

Buletin kedua menampilkan buletin yang berhasil disusun Eks HTI dalam rangka menyebarkan ajaran Islam tentang khilafah. Lambang HTI dapat dilihat pada buletin kedua di pojok kanan sampul. Buletin cetak nomor tiga masih baru. Ditularkan kembali dari rumah aslinya di Eks HTI, Buletin Dakwah Kaffah terus menyebarkannya. Pengumuman baru tersebut diduga karena buletin dakwah kaffah telah diterbitkan dan dibagikan setelah izin eks-HTI dicabut sesuai dengan peraturan yang disahkan dalam UU No. 16 Tahun 2017 tentang UU Ormas. Pemerintahan Jokowi dodo menganggap peraturan ini bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.Dakwah melalui new media

Di era milenial 4.0 ini, dakwah melalui media modern bukanlah hal baru. Itu telah Nampak dari maraknya mubaligh dan mubaligh yang mempelajari dakwah Islam melalui berbagai bentuk media digital. Dakwah menggunakan media modern yang notabene terkendala waktu dan tempat juga dikaji Eks HTI. Hal itulah yang mendorong Eks HTI untuk merambah bidang dakwah, atau menyebarkan berita tentang khilafah, melalui pengembangan media baru. Di bawah ini adalah beberapa akun Eks HTI.

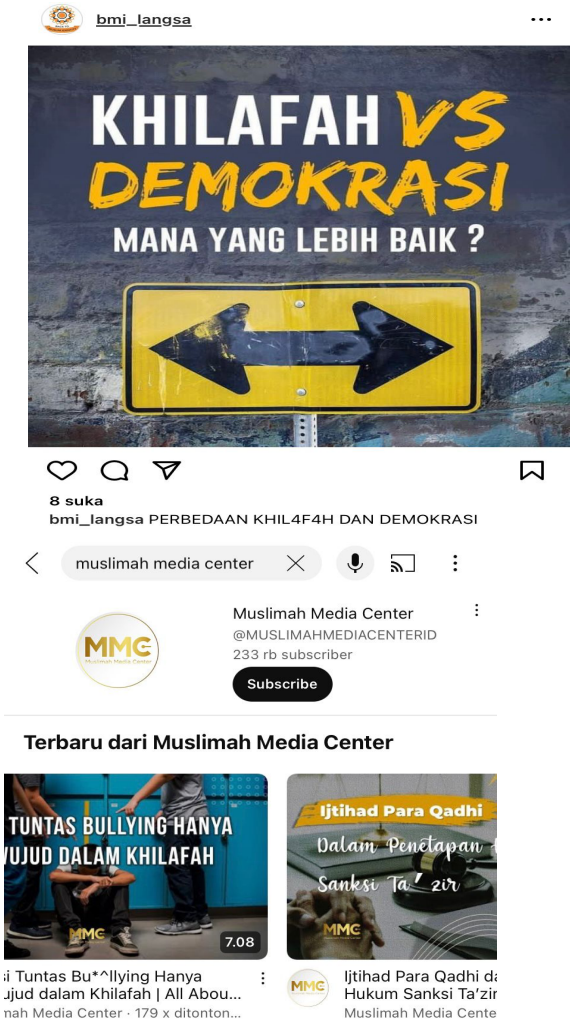
Dakwah melalui platform media sosial antara lain Facebook, Instagram, dan YouTube. ID Berita untuk umat Islam. Dengan itu pemerintah mengeluarkan peraturan berhubungan dengan pembubaran pasca HTI sebagai Gerakan yang dilarang kelompok ini aktif di YouTube menyebarkan dakwah. Banyak pihak yang terpengaruh dengan saluran dakwah Eks HTI sebelum dibongkar. Pada akhirnya, tujuan didirikannya kekhalifahan adalah untuk mewujudkan kesejahteraan global bagi seluruh rakyat.



5) Channel Youtube

Sumber: *https://www.youtube.com/user/htiinfokom*

Setelah Hizbut Tahrir dibubarkan, akun YouTube resmi mereka diblokir di Indonesia. Oleh karena itu, analis hanya mampu menemukan penjelasan atas penonaktifan akun YouTube tersebut, bukan akun resmi Hizbut Tahrir.



Media Instagram semakin sering digunakan untuk dakwah. Mengingat beberapa nama akun resmi HTI telah dibangkitkan. Meski demikian, pesan yang disampaikan tetap konsisten, yakni khilafah digunakan sebagai sarana penyelesaian permasalahan kemasyarakatan. Instagram Dakwah tentang kekhalifahan sebelum pembubarannya dan tanpa mengubah konten setelahnya. Yang berubah hanyalah nama akunnya.

Muslimah_News Id adalah kampanye dakwah Islam yang luas. digalakkan di Facebook dan Instagram. 36,7 ribu orang menjadi pengikut Ig Muslimah_News Id. memasang hingga 852 postingan konten.

Inilah teknik dakwah yang digunakan EKS HTI karena bertujuan untuk menanamkan filosofi Islam. Kami menyebut proses pengenalan filsafat Islam ini sebagai "landasan kekhalifahan". Dengan menegakkan kembali kekhalifahan, EKS HTI mengedepankan cita-cita di masyarakat dan menjalankan dakwah dengan mengubah pemikiran yang sudah mendarah daging. Mewujudkan tujuan mulia melalui tindakan yang berkaitan dengan cita-cita dan tujuan membangun khilafah merupakan pembelajaran penting lainnya yang disampaikan EKS HTI kepada masyarakat.

D. SIMPULAN

Semacam pembaruan dalam filsafat dan institusi Islam adalah reorganisasi kerangka sosial, politik, pendidikan, dan ilmiah yang sudah ketinggalan zaman, termasuk struktur pendidikan Islam. Di dunia Islam, telah lama terjadi gerakan pembaharuan dan pemurnian Islam, baik dari segi wacana secara keseluruhan maupun settingnya. Secara umum, gerakan ini juga dapat dianggap sebagai komponen gerakan sosial yang menginginkan perubahan dalam cara hegemoni Barat tercermin di seluruh dunia, khususnya di dunia Islam.

Dengan menampilkan permasalahannya dengan cara yang menunjukkan bahwa mereka adalah kelompok yang berkomitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peduli terhadap penderitaan warga negaranya, HTI berharap dapat memenangkan hati masyarakat untuk mendukung perjuangannya. Gerakan ideologi anggota HTI tidak akan dilupakan begitu saja, bahkan dengan pembubaran ormas tersebut. Dipahami secara mendalam dalam gagasan-gagasan para penganutnya, ideologi HTI bisa saja muncul kembali sebagai sebuah ormas baru yang menantang HTI, atau bisa saja berbentuk partai baru, atau mungkin mengambil arah berbeda dan bersatu dengan Islam yang sudah ada. partai berbasis.

EKS HTI tetap memberikan dakwah Islam terkait khilafah meski belum ada peraturan perundang-undangannya. Kelompok massa ini, yang menyadari terbatasnya ruang dakwah yang disediakan HTI, menggunakan berbagai media untuk menyebarkan dakwahnya. Oleh karena itu, demi mewujudkan tujuan besar terbentuknya negara khilafah Untuk menyebarkan dakwah Islam, mereka memanfaatkan platform media sosial yang sudah ada. Beberapa platform media sosial yang didukung oleh EKS HTI termasuk BMI, GP, Muslimah News ID, dan buletin mingguan yang disebut Buletin Dakwah Kaffah.

E. DAFTAR PUSTAKA

Aisyah, S. (2019). Halaqah: Media Komunikasi, Publikasi Eksistensi Hizbut Tahrir Indonesia Sebelum Dan Pasca Pembubaran. *Asyahid Journal Of Islamic And Quranic Studies (Ajiqs)*, *1*(1).

Ahmad Subakir, Ahmad Khoirul Mustamir. "Institut Agama Islam Negeri Kediri, Indonesia Institut Agama Islam Tribakti Kediri, Indonesia 1." *Www.Ejournal.Iai-Tribakti.Ac.Id/Index.Php/Tribakti Permanent* 31 (2020): 187–201.

Alhidayatillah, Nur. "Pembaharuan Pemikiran Dalam Islam." *An-Nida'* 42, no. 1 (2018): 87–100. http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Anida/article/view/9340.

Arif, Syaiful. "Pandangan Dan Perjuangan Ideologis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Dalam Sistem Kenegaraan Di Indonesia." *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 7, no. 1 (2016): 93–104. https://doi.org/10.46807/aspirasi.v7i1.1282.

Asyari, Suaidi. "Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam Di Indonesia." *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 35, no. 2 (2011): 295–313. https://doi.org/10.30821/miqot.v35i2.145.

Azman Azman. “5329-Article Text-12634-1-10-20180716” 7, no. 1 (2018): 99–113.

FATLAHAH, ANIEK. “Metadata, Citation and Similar Papers at Core.Ac.Uk 4.” *Донну* 5, no. December (2015): 118–38.

Firdaus, M. “Pola Komunikasi Aktivis Hizbut Tahrir Dalam Mengembangkan Dakwah Islam.” *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2018. https://jkms.ejournal.unri.ac.id/index.php/JKMS/article/view/5670.

Lubis, M. Ridwan. “Pembaharuan Pemikiran Islam : Dasar,Tujuan, Dan Masa Depan.” *Ilmu Ushuluddin* 5, no. 2 (2016): 223–46.

M Azzam Manan. “Pemikiran Pembaruan Dalam Islam: Pertarungan Antara Mazhab Konservatif Dan Aliran Reformis.” *Masyarakat Indonesia*, no. 2 (2021): 187–207. http://ejournal.lipi.go.id/index.php/jmi/article/view/653.

Ma, Liran, Jianbin Luo, 桑原信弘, Takuya Hiramoto, Yasushi Onumata, Yoshitaka Manabe, Hiromitsu Takaba, et al. “No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における　健康関連指標に関する共分散構造分析Title.” *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part J: Journal of Engineering Tribology* 224, no. 11 (2019): 122–30.

Muazaroh, Siti. “Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia Perspektif Maqashid: Otoritas Atau Otoritarianisme.” *Justicia Islamica* 16, no. 1 (2019): 103–20. https://doi.org/10.21154/justicia.v16i1.1622.

Multikultural, Jurnal. “1 Issn 1412-663x” VIII, no. 31 (n.d.).

Nadialista Kurniawan, Risyad Arhamullah. “No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析Title.” *Industry and Higher Education* 3, no. 1 (2021): 1689–99. http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/1288.

Qohar, Abd, and Kiki Muhamad Hakiki. “Eksistensi Gerakan Idiologi Transnasional HTI Sebelum Dan Pasca Pembubaran.” *Kalam* 11, no. 2 (2017): 365–96. https://doi.org/10.24042/klm.v11i2.1403.

Rizki, Mochamad Faizal. “Deradikalisasi Pengikut Hizbut Tahrir Indonesia Pasca Terbitnya Perppu No.2 Tahun 2017 Tentang Ormas.” *Jurnal Politikom Indonesiana* 3, no. 1 (2018): 164.

Rouf, A. “Hizbut Tahrir: Pemikiran Dan Pergerakan Sosial-Politik Di.” *Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula* 7 (2022): 175–89.

Saefullah, Asep. “MEMBANGUN PERADABAN DUNIA YANG DAMAI: PENTINGNYA PEMBAHARUAN ISLAM DAN ‘KEARIFAN’ BARAT (Tinjauan Buku ‘Masa Depan Islam’ Karya John L. Esposito).” *Harmoni* 11, no. 1 (2012): 147–54. https://doi.org/10.32488/harmoni.v11i1.238.

Setia, Paelani. "Kekhilafahan_Islam_Globalisasi_dan_Gerilya_Maya_St.Pdf" 9 (2021): 241–64. https://doi.org/10.21043/fikrah.v8i1.

Shobron, Sudarno. "Model Dakwah Hizbut Tahrir." *Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta* 15, no. 1 (2014): 44–62. https://scholar.google.com/scholar?start=30&q=teologi+hizbut+tahrir&hl=id&as_sdt=0,5#:~:text=Shobron%2C S. (2014). Model Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia.

Sosial, Al-tadabbur Kajian. "Pengertian Modern, Latar Belakang Muncul Dan Berkembangnya Pembaharuan Dalam Islam." *Al-Tadabbur: Kajian Sosial, Peradaban, Dan Agama* 8, no. 1 (2022): 93–111. http://dx.doi.org/10.46339/altadabbur.

Sultan, Iain, and Amai Gotontalo. "Sejarah Pembaruan Islam Di Indonesia Rifki Abror Ananda A . Pendahuluan Secara Teologis Islam Merupakan Sistem Nilai Dan Ajaran Yang Bersifat Ilahiah (Transenden). Dalam Posisi Ini Islam Merupakan Pandangan Dunia (Weltanschaung) Yang Memberikan " Kaca" 2, no. 1 (2019): 19–40.

Uswatusolihah, Uus, and Sangidun Sangidun. "Interaksi Sosial Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (Mhti) Pasca Pembubaran." *YINYANG: Jurnal Studi Islam, Gender Dan Anak* 13, no. 2 (2018): 349–69. https://doi.org/10.24090/yinyang.v13i2.2018.pp349-369.

Yunarman, Sepri, Nurul Fhadilah, and Ali Akbarjono. "GERAKAN SOSIAL EKS HIZBUT TAHRIR INDONESIA PASCA PEMBUBARAN (Studi Kasus Di Bengkulu)." *Jurnal Sosiologi Nusantara* 8, no. 1 (2021): 59–84.

Zulfadli, Zulfadli. "Orientasi Politik Aktivis Eks Hizbut Tahrir Indonesia Pasca Dibubarkan." *Kontekstualita* 33, no. 02 (2018): 169–89. https://doi.org/10.30631/kontekstualita.v35i02.133.